

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi tak hentinya dilakukan di setiap daerah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mempercepat pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi akan mempunyai dampak terhadap beberapa hal diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, perbaikan distribusi pendapatan serta berpengaruh terhadap kondisi kemajuan daerah pada waktu selanjutnya. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan strategi.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa berlakunya otonomi daerah sekaligus juga merupakan pengalihan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur daerahnya. Dengan berlakunya otonomi daerah telah mendorong desentralisasi fiskal dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah tak lepas dari kebutuhan anggaran dan belanja daerah.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pula dijelaskan tentang perimbangan keuangan dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah pembagian keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan

dengan melihat pada potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah sebagai pemegang fungsi distribusi, stabilisasi dan alokasi harus meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Oleh karena itu, adanya desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi lebih banyak porsi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengingat pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi serta situasi masyarakat setempat.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan pemerintah daerah didapatkan dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adanya desentralisasi fiskal memberikan keleluasan pada pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penggalan potensi daerah tersebut membuat setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing dalam menyikapi pengelolaan aset daerah dan penerapan kebijakan pajak dan retribusi yang notabene menjadi sumber terbesar dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Pajak dan retribusi yang memiliki porsi terbesar dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sasaran utama pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan pemerintahan yang sesuai untuk belanja daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya adalah salah satu strategi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan target pajak dan retribusi selalu diusahakan setiap tahunnya.

Adanya otonomi daerah yang ditandai dengan mulai digencarkannya aksi pembangunan dengan sistem *bottom up* telah membuat daerah tingkat kabupaten/kota memiliki peluang sekaligus tantangan yang sama-sama besar untuk mengembangkan daerahnya. Peluang besar yang didapatkan dari adanya otonomi daerah adalah adanya kebebasan untuk setiap daerah dalam mengembangkan potensi dan kekhasan wilayah, melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut, serta daerah memiliki wewenang penuh untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya tanpa meninggalkan arah pembangunan nasional. Tantangan dari adanya otonomi daerah yaitu pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan dalam mengelola daerah, mampu menciptakan *masterplan* pembangunan yang efektif dan efisien yang mempunyai *outcome* hingga *impact* terhadap masyarakat, kemampuan dalam mengelola anggaran baik dari sisi pendapatan maupun dari segi pembelanjaan, serta adanya peran aktif masyarakat dalam pembangunan juga menjadi tantangan tersendiri dalam era otonomi daerah. Pembangunan yang partisipatif, adil dan transparan merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan percepatan pembangunan.

Menurut Sukirno dalam (Syarif : 2014), guna mencapai hakikat dan arah pembangunan maka pembangunan ekonomi harus didasarkan oleh kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik serta kelembagaan yang ada. Untuk merancang dan membangun perekonomian daerah perlu adanya pembangunan yang partisipatif dimana masyarakat juga berperan aktif dalam rencana pembangunan pemerintah dalam menaksir sumber daya yang paling diperlukan untuk pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki arti yang berbeda namun tetap memiliki keterkaitan. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi seharusnya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat karena dinilai adanya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Desentralisasi fiskal ditetapkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Setiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dituntut untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Kabupaten Madiun sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia tentunya tak lepas dari kebijakan tersebut. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Madiun menjadikan beberapa elemen yang ada di Kabupaten Madiun sebagai potensi pendapatan melalui pajak dan retribusi.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 5 wilayah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah paling sempit yakni hanya sebesar 2,17% dari total wilayah di Jawa Timur dan merupakan 3 besar wilayah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah wilayah administratif paling sedikit setelah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Jumlah penduduk di Kabupaten Madiun juga tergolong pada jumlah yang cukup kecil dibandingkan kabupaten lain yang ada di Jawa Timur yakni hanya sebesar 676.087 jiwa, termasuk bagian terkecil dari total distribusi penduduk di Provinsi Jawa Timur. Penduduk Kabupaten Madiun hanya sebesar 1,74% dari total penduduk wilayah Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Madiun juga memiliki ruas panjang jalan provinsi sejauh 15.560 km merupakan jalan provinsi terpendek kedua setelah Tulungagung, dibanding wilayah kabupaten lain yang ada di Jawa Timur namun pendapatan daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Madiun masih mampu mengimbangi daerah kabupaten lain yang ada di Jawa Timur sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai sektor yang mempengaruhi pendapatan daerah di Kabupaten Jawa Timur.

Kondisi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Madiun juga perlu dijadikan kajian tersendiri. Kinerja pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berupa transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Perlu adanya analisis terhadap kondisi kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Madiun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan wewenang pemerintah daerah secara utuh merupakan obyek yang perlu dikaji lebih dalam mengingat semakin penuh

kewenangan yang dimiliki maka semakin tinggi pula adanya probabilitas terjadinya pembenahan dalam pengelolaan keuangan, begitu juga sebaliknya dimana probabilitas untuk terjadi penyalahgunaan anggaran juga semakin besar.

Jika melihat pada pentingnya peran pajak dan retribusi sebagai sumber vital dalam pendanaan pelaksanaan pemerintahan, maka diperlukan kajian yang lebih dalam lagi mengenai sumber potensi dan penetapan proyeksi pajak dan retribusi daerah. Pada dasarnya sumber pajak dan retribusi daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun No 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perda No 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda No 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Madiun dihasilkan dari beberapa komponen yakni pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Sumber pendapatan dari retribusi memiliki komponen yang lebih beragam dibandingkan dengan pendapatan dari pajak. Berdasarkan data yang ada capaian target retribusi di Kabupaten Madiun dapat dikatakan sangat baik dengan melihat persentase capaian yang selalu berada di atas 80%. Tingginya capaian target retribusi di Kabupaten Madiun dapat diapresiasi positif baik dari dinas

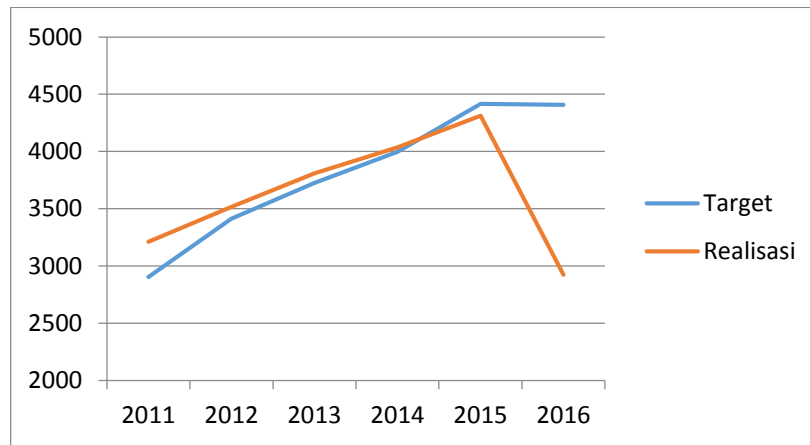
penyelenggara maupun dari masyarakat. Tingginya capaian retribusi menunjukkan bahwa pemerintah cukup tepat dalam memproyeksikan kemampuan retribusi daerah sehingga diperoleh hasil yang cukup tinggi dalam realisasinya. Di sisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat juga taat dalam pembayaran retribusi sehingga kekurangan dalam pencapaian target retribusi tidak lebih dari 20%.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Tahun	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Persentase
2011	2.904.500.000	3.212.600.000	111%
2012	3.412.150.000	3.516.620.000	103%
2013	3.725.115.000	3.808.935.000	102%
2014	3.996.624.000	4.037.185.000	101%
2015	4.415.647.000	4.311.535.000	98%
2016	4.407.520.000	2.924.355.000	66%*

Sumber : Dispenda Kabupaten Madiun, 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target dan capaian realisasi retribusi parkir pinggir jalan di Kabupaten Madiun menunjukkan kondisi yang baik dengan terpenuhinya capaian proyeksi retribusi yang ditunjukkan dengan tingginya persentase nilai realisasi target realisasi. Hanya pada tahun 2016 terjadi gap yang cukup jauh antara target dengan realisasi hal ini dikarenakan data pada tahun 2016 belum sepenuhnya masuk di hitungan namun masih merupakan data dari catur wulan kedua.



**Gambar 1.1 Grafik Target dan Realisasi Retribusi Parkir Pinggir Jalan
Kabupaten Madiun**

(Sumber : Dispenda Kabupaten Madiun (data diolah), 2016)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat retribusi parkir pinggir jalan di Kabupaten Madiun pada tahun 2011-2014 selalu melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Realisasi retribusi dari parkir kendaraan di pinggir jalan selalu berada di angka yang di atas target proyeksi retribusi. Hal ini merupakan adanya dua indikasi kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait. Tingginya capaian retribusi dapat diindikasikan sebagai baiknya kinerja pemerintah daerah. Proyeksi anggaran yang terpenuhi bahkan melebihi target merupakan gambaran bahwa pemerintah daerah telah mampu menjalankan fungsinya. Di sisi lain tingginya capaian yang diraih dapat pula disebabkan karena masih tingginya kebocoran anggaran dimana seharusnya potensi retribusi yang ada di daerah Kabupaten Madiun adalah melebihi dari angka yang dijadikan proyeksi anggaran sehingga tercapainya target retribusi bukanlah perkara yang sulit karena potensi yang ada di lapangan masih lebih besar.

Seperti yang telah umum diketahui bahwa kebocoran retribusi sangat rawan terjadi terlebih pada retribusi parkir. Tingginya pengguna kendaraan bermotor tentu memiliki pengaruh terhadap kondisi akan kebutuhan parkir. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa parkir merupakan potensi retribusi yang memiliki nilai tinggi mengingat di setiap sudut daerah tak lepas dari adanya parkir kendaraan bermotor. Oleh sebab itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai besarnya potensi retribusi dari parkir tersebut dalam kajian yang berjudul “ANALISIS PROYEKSI, REALISASI, DAN POTENSI RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI KABUPATEN MADIUN”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Berapa besarnya potensi retribusi parkir kendaraan di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana relevansi antara proyeksi, realisasi, dan potensi retribusi parkir di Kabupaten Madiun?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya potensi retribusi parkir yang ada di Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tingkat relevansi antara proyeksi, realisasi, dan potensi retribusi parkir yang ada di Kabupaten Madiun.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam kajian terhadap ilmu ekonomi khususnya yang berhubungan dengan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada kondisi di masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pemikiran guna memperkaya konsep, teori dan kondisi empiris dalam mempelajari ilmu ekonomi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Madiun untuk mengelola potensi retribusi parkir yang ada di Kabupaten Madiun dengan lebih baik.

2. Bagi Mahasiswa

- 1). Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui kondisi riil potensi retribusi parkir yang ada di Kabupaten Madiun.
- 2). Sebagai referensi bagi mahasiswa maupun peneliti dari bidang lainnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sejenis.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Madiun khususnya mengenai kondisi tarif parkir yang sebenarnya berlaku di Kabupaten Madiun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap bab disusun oleh beberapa sub bab. Setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab lain.

Pembahasan tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian yang merupakan sekumpulan fakta dan data yang menarik untuk diteliti, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan atas fakta yang terjadi yang membutuhkan jawaban melalui pemecahan masalah serta berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, yakni teori-teori yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini sebagai perbandingan dalam menyusun penelitian. Terdapat pula kerangka berpikir yang merupakan konsep perjalanan dalam menemukan hasil penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari adanya penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini tersusun atas metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, pendekatan yang dilakukan, identifikasi dari setiap variabel, definisi operasional variabel, jenis

data, sumber data, serta prosedur dalam menghimpun data dan cara mengolah dan menganalisis data supaya didapatkan hasil penelitian sesuai yang diharapkan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan uraian dari analisis deskriptif, objek penelitian, analisis pada data, dan juga pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dan saran –saran dari penelitian.